

# KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YOUTUBER DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN BANK MENGGUNAKAN KONTEN YOUTUBE

Virly Vidiasti Sabijanto <sup>(1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung, Indonesia, Email: [virly.vidiasti@unpas.ac.id](mailto:virly.vidiasti@unpas.ac.id)

## ABSTRAK

Artikel ini meneliti peran Konten YouTube sebagai aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hal ini hak cipta dalam transaksi pembiayaan bank, di mana konten tersebut dijadikan jaminan. Fokus utama adalah pada bagaimana konten yang dilindungi hak cipta, seperti yang terdapat pada YouTube, dapat meningkatkan nilai dan memberikan kepastian hukum pada aset dalam pembiayaan. Dengan metode analisis yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengulas regulasi, pandangan ahli, dan aspek hukum terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan fokus khusus pada konten YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten YouTube berpotensi besar sebagai jaminan dalam pembiayaan namun terhalang oleh tantangan hukum seperti penentuan nilai HKI, perlindungan hak cipta, dan dinamika pasar yang berubah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberikan dukungan terhadap ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan berbasis HKI, memerlukan kesadaran hukum dan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat. Kesimpulan menekankan pentingnya tindakan proaktif dari bank untuk melindungi hak cipta ketika menggunakan konten YouTube sebagai jaminan, serta pentingnya kepastian hukum untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif. Implementasi regulasi ini dianggap strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, dengan perlindungan dan pemanfaatan HKI sebagai aset utama.

**Kata Kunci :** Hak Kekayaan Intelektual, Transaksi Pembiayaan Bank, Konten YouTube sebagai Jaminan, Pelaku Ekonomi Kreatif, Kepastian Hukum.

## **ABSTRACT**

*This article examines the role of YouTube Content as an intellectual property asset (IP) in copyright transactions in banking financing, where the content is used as collateral. The main focus is on how copyrighted content, such as that found on YouTube, can enhance value and provide legal certainty on the assets in financing. Using normative juridical analysis and qualitative analysis methods, this research discusses regulations, expert views, and legal aspects related to Intellectual Property Rights (IPRs), with a specific focus on YouTube content. The research findings indicate that YouTube content has great potential as collateral in financing but is hindered by legal challenges such as determining the value of IPRs, copyright protection, and changing market dynamics.*

*Government Regulation Number 24 of 2022 supports the creative economy through an IPR-based financing scheme, requiring legal awareness and collaboration among all stakeholders. The conclusion emphasizes the importance of proactive action by banks to protect copyrights when using YouTube content as collateral, as well as the importance of legal certainty to support creative economic actors. The implementation of these regulations is considered strategic to support the growth of the creative economy, with the protection and utilization of IPRs as key assets.*

**Keywords:** *Intellectual Property Rights, Bank Financing Transactions, YouTube Content as Collateral, Creative Economy Actors, Legal Certainty.*



## I. PENDAHULUAN

Pemulihan ekonomi global setelah pandemi Covid-19 tampak melambat, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi keuangan yang lebih ketat, pertumbuhan perdagangan yang lemah, dan rendahnya optimisme dunia usaha dan konsumen.

Pertumbuhan ekonomi global tidak merata. Negara-negara Eropa mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan Amerika Utara dan beberapa negara besar Asia, dengan pengecualian Tiongkok yang menghadapi tantangan di sektor properti dan melemahnya optimisme bisnis. Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan yang kuat, didorong oleh konsumsi dan investasi. Sementara itu, aktivitas ekonomi di kawasan Euro telah pulih meski dengan laju yang lebih lambat. Negara-negara berkembang, terutama yang berpendapatan rendah, menunjukkan pemulihan yang lebih moderat, dipengaruhi oleh tingginya suku bunga dan depresiasi mata uang (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2023).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan melawan guncangan perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain didukung oleh seluruh komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Pada Triwulan III Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan penurunan, tercatat hanya sekitar 4,9% (YoY). Penyebab utama perlambatan ini adalah faktor musiman yang umumnya membuat pertumbuhan pada triwulan III lebih rendah dibandingkan triwulan II. Selain itu, penurunan ini juga dipengaruhi oleh minimnya kegiatan hari besar keagamaan dan tidak adanya perayaan hari raya sepanjang periode tersebut di tahun 2023 (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2023b).

IMF (International Monetary Fund) memprediksi pertumbuhan ekonomi global di dalam World Economic Outlook terbitan Oktober 2023, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,5% pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhannya sebesar 3% dan 2,9% pada tahun 2024. Revisi tersebut dibantu oleh penguatan kinerja di beberapa negara besar akhir 2022 dan mulai meredanya tekanan inflasi dunia yang diprediksi melambat secara gradual di tahun 2023.

Harus diakui, Indonesia memiliki potensi yang besar pada ekonomi digital. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum dibarengi dengan regulasi yang memadai, khususnya regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi (PDP). Bank DBS Indonesia melihat potensi ekonomi digital mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional kendati ekonomi Indonesia mengalami krisis akibat Covid-19. Sebagai negara yang berpartisipasi dalam penggunaan media sosial tertinggi, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat selama satu dekade terakhir. Hal ini tentu saja dengan dukungan beberapa perusahaan startup yang ada di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO, Shopee, Grab, Ruangguru, dan Dana.

Sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, Indonesia adalah magnet bagi perusahaan digital yang ingin menjadi *Unicorn*. Sejak 2013, sudah ada 21 perusahaan yang menggarap pasar RI berhasil menjadi *Unicorn*.

Blibli, Fintech Xendit dan perusahaan F&B Kopi Kenangan sukses mencapai status unicorn pada 2021 (Intan Rakhmayanti Dewi, 2023).

Aktifitas industri ini dipengaruhi secara signifikan oleh kebutuhan masyarakat Indonesia selama wabah Covid-19 melanda, dimana pada saat angka kematian akibat infeksi Covid-19 tinggi, masyarakat Indonesia membatasi aktifitasnya di luar ruangan dan mengalihkannya ke aktifitas yang sifatnya virtual. Belajar, bekerja, berdagang, dan lain-lain dilakukan secara virtual, karenanya di sana tersebut perusahaan besar maupun startup berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan layanan bahkan membuat perangkat-perangkat yang menunjang kegiatan manusia secara virtual.

Fokus dari penelitian ini adalah mengulas profesi yang semakin populer, yaitu seorang Konten Kreator (*Content Creator*). Profesi ini seringkali terkait dengan platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Podcast, meskipun tidak terbatas pada itu.

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kebijakan ekonomi kreatif dalam era ekonomi digital mendapat dukungan

dari regulasi dan peran aktif pemerintah. Ekonomi kreatif mencerminkan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang berasal dari kreativitas, dapat bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi (Sudaryat, 2010).

Sebagai langkah konkret untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 (Peraturan Pemerintah No. 24, 2022), yang mengatur tentang fasilitasi skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (Ade Rafli, M., Bachri, E., & Ramadan, 2023). Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa skema pembiayaan tersebut dapat dilaksanakan dengan menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank (Lutfi, 2017).

Menggunakan konten YouTube sebagai jaminan pembiayaan dapat menimbulkan sejumlah hambatan dan tantangan dalam aspek hukum. Beberapa di antaranya melibatkan kompleksitas perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan peraturan transaksi keuangan. Berikut adalah analisis lebih rinci terkait hambatan dan tantangan tersebut:

### 1. Perlindungan Hak Cipta

**Pemilikan Hak:** Menentukan pemilik sah dari konten YouTube dan hak cipta terkait dapat menjadi rumit, terutama jika konten tersebut dibuat oleh lebih dari satu individu atau jika ada perjanjian khusus terkait kepemilikan.

**Lisensi Penggunaan:** Jika konten menggunakan materi dari pihak ketiga, perlu dipastikan bahwa pemilik hak cipta asli memberikan lisensi yang memadai untuk penggunaan tersebut.

### 2. Pembiayaan dan Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual

**Pengakuan Nilai Kekayaan Intelektual** yaitu, menilai dan mengakui nilai sebenarnya dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh konten YouTube bisa menjadi tugas yang rumit dan memerlukan penilaian yang cermat.

### 3. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian Peraturan yaitu, lingkungan hukum yang berkaitan dengan penggunaan konten YouTube dalam transaksi pembiayaan mungkin masih

berkembang, dan kepastian hukum terkait perlu diperjelas untuk menghindari ketidakpastian.

#### 4. Kontrak dan Perjanjian

Penyusunan Kontrak: Proses menyusun kontrak pembiayaan yang melibatkan hak kekayaan intelektual perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang sangat spesifik dari hak cipta, termasuk hak penggunaan, pembagian pendapatan, dan hak pengalihan.

#### 5. Pemenuhan Persyaratan Pembiayaan

Dokumentasi yang Tepat: Memastikan semua dokumen dan persyaratan pembiayaan terkait hak kekayaan intelektual diatur dengan tepat, memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan dan praktik industri.

#### 6. Risiko Penggunaan yang Tidak Sah

Pemantauan dan Penegakan: Risiko penggunaan yang tidak sah atau pelanggaran hak oleh pihak ketiga memerlukan strategi pemantauan dan penegakan hak kekayaan intelektual yang efektif.

#### 7. Perubahan Platform dan Kebijakan

Ketidakpastian Kebijakan Platform: Perubahan kebijakan platform seperti YouTube dapat mempengaruhi hak dan kewajiban terkait konten, sehingga perlu mengikuti perkembangan tersebut.

Jumlah pengguna YouTube di Indonesia bisa dikatakan mencapai 50% dari total penduduk. Indonesia merupakan pengguna YouTube terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, menurut data yang diambil dari We Are Social. Bahkan pada tahun 2022, menurut Yudi Yudhawan, Wakil Presiden YouTube Apac Gautam Anand, YouTube telah berkontribusi terhadap PDB Indonesia dengan jumlah mencapai 7,5 triliun. Dari total 267 juta penduduk Indonesia, penggunaan media sosial YouTube mencapai 139 juta pengguna dengan pangsa pasar sebesar 21,42% pada bulan April 2022 (Sutikno, Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas. Sabiq, Fairuz. & Nashirudin, 2024).

Dalam prosesnya, kita akan menjawab sejumlah pertanyaan yang krusial: Bagaimanakah kepastian hukum konten YouTube sebagai jaminan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perspektif hukum jaminan? dan bagaimanakah implementasi atas pengaturan pembiayaan kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dan analisis kualitatif, sebagaimana diuraikan oleh Soekanto, Soerjono, dan Mamudji (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2015). Ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam peraturan perundang-undangan, dan pandangan ahli, dengan fokus khusus pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seorang kreditur bank yang menggunakan jaminan konten YouTube. Peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan data hukum melalui studi dokumen, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan publikasi hukum lainnya. Data utama yang menjadi basis penelitian ini bersifat data sekunder atau data kepustakaan. Oleh karena itu, tahap utama dalam perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang melibatkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang digunakan, melibatkan proses pengumpulan, pembacaan, dan analisis data dengan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif, sehingga hasilnya bersifat deskriptif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Potensi Konten YouTube Sebagai Jaminan Transaksi Pembiayaan Bank

Dalam era globalisasi, kemajuan di berbagai sektor menuntut adanya aturan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Secara umum, sudah ada pengakuan dan perlindungan hukum untuk karya-karya yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual di berbagai bidang seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi,

yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Pardede, Agustinus, 2020).

Dalam konteks transaksi pembiayaan bank, konsep hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) mencakup hak-hak legal yang melekat pada karya-karya intelektual yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Dalam transaksi pembiayaan, karya-karya intelektual tersebut, seperti konten YouTube, dapat dijadikan jaminan atau aset yang dapat diakui nilai keuangannya (Asrika Fazlia, S., Suryahartati, D., & Naili Hidayah, L., 2022).

Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menandai kemajuan signifikan dalam bidang ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual. Undang-Undang ini memberikan kemudahan bagi pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapat hak-hak ekonomi mereka (Undang-Undang No. 24, 2019).

Aspek-aspek utama dalam Konsep Hak Cipta dan Relevansinya Dalam Konteks Transaksi Pembiayaan:

Hak Cipta (*Copyright*), adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya-karya asli mereka (Lutfi, 2017). Ini mencakup hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, dan mengadaptasi karya tersebut. Hak cipta memberikan perlindungan otomatis sejak karya tersebut diciptakan dan tidak memerlukan registrasi formal. Dalam konteks konten YouTube, hak cipta melibatkan video, skrip, musik, dan elemen kreatif lainnya.

Relevansi dalam Konteks Transaksi Pembiayaan:

Dalam transaksi pembiayaan, hak cipta pada konten seperti video YouTube melibatkan kontrol eksklusif terhadap penggunaan dan distribusi karya tersebut. Jika dijadikan jaminan, nilai hak cipta terkait dengan daya tarik dan popularitas konten, serta potensi penghasilan masa depan.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum kekayaan intelektual, pembuatan kontrak yang cermat, dan

pemenuhan persyaratan hukum dalam penggunaan konten YouTube sebagai jaminan pembiayaan.

Penyelidikan potensi konflik yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta dalam transaksi pembiayaan konten YouTube melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul terkait kepemilikan, penggunaan, dan proteksi HKI.

Berikut adalah deskripsi mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelidikan potensi konflik:

### **1. Pemeriksaan Kepemilikan**

**Analisis Kepemilikan Awal:** Menentukan siapa yang memiliki hak cipta awal terhadap konten YouTube. Hal ini melibatkan pemeriksaan dokumen, perjanjian, atau kontrak awal yang mencakup pembagian kepemilikan antara kontributor atau pihak terkait.

### **2. Eksplorasi Lisensi dan Izin**

**Lisensi Penggunaan Materi:** Jika konten menggunakan materi dari pihak ketiga, perlu dipastikan bahwa ada lisensi yang sah dan cukup untuk penggunaan tersebut. Pemeriksaan dokumen lisensi dan izin sangat penting.

### **3. Penilaian Potensi Klaim Pihak Ketiga**

**Potensi Klaim Hak Cipta:** Identifikasi potensi klaim atau tuntutan dari pihak ketiga terkait dengan hak cipta. Melibatkan pemeriksaan sejarah klaim atau tuntutan serupa terhadap konten atau pembuat konten terkait.

### **4. Kepastian atas Pemenuhan Syarat-syarat**

**Syarat-syarat HKI:** Pastikan pemenuhan semua syarat yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempertahankan hak kekayaan intelektual, seperti pendaftaran hak cipta atau perlindungan merek dagang.

### **5. Audit Dokumen Kontrak dan Perjanjian**

**Analisis Dokumen Hukum:** Melakukan audit mendalam terhadap semua dokumen hukum terkait, termasuk kontrak pembuatan konten, perjanjian lisensi, dan kontrak pembiayaan. Pastikan ketentuan hak cipta dan penggunaan dijelaskan dengan jelas.

## **6. Penilaian Konsistensi Kebijakan Platform**

**Kebijakan Platform:** Jika konten dipublikasikan melalui platform seperti YouTube, periksa konsistensi dengan kebijakan platform terkait hak kekayaan intelektual. Platform mungkin memiliki persyaratan khusus yang perlu diperhatikan.

## **7. Risiko Pelanggaran Hak Pihak Ketiga**

**Evaluasi Risiko Pelanggaran:** Penilaian terhadap risiko pelanggaran hak pihak ketiga, baik terkait dengan materi yang digunakan dalam konten maupun hak cipta yang diterapkan pada konten tersebut.

Penyelidikan potensi konflik ini penting untuk mengidentifikasi risiko dan meminimalkan kemungkinan sengketa yang dapat muncul dalam proses transaksi pembiayaan konten YouTube. Dengan pemahaman yang cermat tentang kepemilikan dan hak kekayaan intelektual, pihak terlibat dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka.

Hak cipta merupakan aset yang sangat penting dalam konteks ekonomi kreatif dan transaksi pembiayaan. Hak cipta melibatkan kontrol atas konten kreatif, merek dagang menciptakan identitas merek yang kuat, dan paten mencakup inovasi teknologi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Dalam transaksi pembiayaan, nilai dan perlindungan hukum dari jenis hak kekayaan intelektual ini menjadi faktor kunci dalam menentukan kepastian dan nilai transaksi.

## **B. Peran Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan Pembiayaan**

Peraturan perundang-undangan memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi pembiayaan berbasis konten YouTube dan ekonomi kreatif secara umum. Salah satu peraturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2019 tentang Ekonomi Kreatif. Berikut adalah paparan mengenai peran peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, dalam mengatur kepastian hukum dalam transaksi ini:

#### 1. Definisi dan Lingkup Regulasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 menyediakan definisi dan lingkup ekonomi kreatif. Ini membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang masuk dalam cakupan ekonomi kreatif dan transaksi yang relevan.

#### 2. Pengaturan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum untuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, yang termasuk dalam konteks transaksi pembiayaan dengan konten YouTube. Hal ini memberikan kejelasan bahwa transaksi semacam ini sah secara hukum.

#### 3. Fasilitasi Pembiayaan

Peraturan tersebut juga memberikan dasar hukum untuk fasilitasi pembiayaan dalam rangka mendukung ekonomi kreatif. Ini dapat mencakup insentif dan bantuan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses pembiayaan.

#### 4. Peran Pemerintah

Undang-Undang tersebut menetapkan peran Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dalam mengembangkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Ini termasuk dalam pengembangan dan pengawasan transaksi semacam ini untuk memastikan kepatuhan hukum.

#### 5. Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang tersebut juga mungkin mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan untuk transaksi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, yang merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian hukum. (Undang-Undang No. 24, 2019)

Selain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, transaksi keuangan, dan bisnis juga dapat memainkan peran dalam memberikan

kepastian hukum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi semacam ini untuk memahami dan mematuhi semua peraturan yang berlaku demi menjaga kepastian hukum dalam ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis.

Penilaian mengenai sejauh mana regulasi tersebut mendukung atau menimbulkan ketidakpastian dalam penggunaan konten YouTube sebagai jaminan pembiayaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di sini, kita akan mencoba memberikan paparan tentang beberapa pertimbangan terkait:

### **1. Klarifikasi Definisi dan Ketentuan**

Jika regulasi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 memberikan definisi yang jelas dan ketentuan yang terinci mengenai penggunaan konten YouTube sebagai jaminan pembiayaan, hal ini akan mendukung kepastian hukum. Penjelasan yang lengkap tentang bagaimana konten YouTube dapat digunakan sebagai jaminan, apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta prosedur yang harus diikuti akan membantu menghindari ketidakpastian.

### **2. Ketentuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Regulasi harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak kekayaan intelektual pemilik konten YouTube yang digunakan sebagai jaminan. Ini mencakup perlindungan hak cipta, hak merek dagang, dan hak paten yang relevan. Ketika pemilik konten merasa hak-haknya aman, ini akan mengurangi ketidakpastian.

### **3. Prosedur dan Mekanisme Penilaian Kekayaan Intelektual**

Regulasi yang baik harus menyediakan prosedur yang jelas dan mekanisme penilaian kekayaan intelektual yang digunakan sebagai jaminan. Ini mencakup penilaian nilai konten YouTube yang dijamin. Penilaian yang transparan dan konsisten akan membantu menghindari konflik dan ketidakpastian.

#### **4. Penyelesaian Sengketa**

Regulasi juga harus mencakup ketentuan yang jelas tentang penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi semacam ini. Dengan demikian, jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, ada prosedur yang telah ditetapkan untuk menyelesaikannya.

#### **5. Pendekatan Fasilitatif**

Jika regulasi memberikan fasilitasi atau insentif bagi pemilik konten YouTube dan pihak yang menggunakan konten sebagai jaminan, hal ini akan mendukung penggunaan konten tersebut dalam transaksi pembiayaan. Fasilitasi ini dapat berupa insentif pajak, dukungan keuangan, atau bantuan teknis.

#### **6. Pengawasan dan Penegakan**

Regulasi harus mencakup pengawasan dan penegakan yang efektif untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Ini juga akan menciptakan kepastian hukum dengan menghindari pelanggaran yang merugikan.

Penting untuk diingat bahwa kepastian hukum dalam penggunaan konten YouTube sebagai jaminan pembiayaan tidak hanya tergantung pada regulasi, tetapi juga pada bagaimana regulasi tersebut diterapkan dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peran penyelenggara hukum, perbankan, pemilik konten, dan pihak lainnya dalam ekosistem transaksi semacam ini juga sangat penting untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan.

### **C. Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual**

Dalam upaya mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan memberikan insentif bagi pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 12 Juli 2022 (Pasal 19 & 22 UU No. 24, 2019).

Konsep Ekonomi Kreatif sendiri diartikan sebagai peningkatan nilai dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berakar pada warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Oleh karena itu, melalui PP Nomor 24 Tahun 2022 ini, pemerintah telah mengatur beberapa ketentuan terkait implementasi Ekonomi Kreatif, antara lain:

**1. Pembiayaan Ekonomi Kreatif:**

Mengatur skema pembiayaan yang mendukung pertumbuhan sektor Ekonomi Kreatif.

**2. Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual:**

Memberikan panduan terkait pengembangan sistem pemasaran untuk produk Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan kekayaan intelektual.

**3. Infrastruktur Ekonomi Kreatif:**

Menetapkan langkah-langkah untuk membangun infrastruktur yang mendukung perkembangan Ekonomi Kreatif.

**4. Insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif:**

Menyediakan rangsangan atau keuntungan bagi para pelaku Ekonomi Kreatif guna mendorong aktivitas kreatif dan inovatif.

**5. Tanggung Jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif:**

Menetapkan kewajiban dan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.

**6. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan:**

Merinci mekanisme penyelesaian sengketa terkait pembiayaan di dalam ranah Ekonomi Kreatif (Peraturan Pemerintah No. 24, 2022).

Pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan. Persyaratan yang ditentukan dalam PP No. 24 Tahun 2022 termasuk penyusunan proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait dengan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, seperti Hak Cipta.

Proses penilaian kekayaan intelektual dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual atau panel penilai, dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti biaya, pasar, pendapatan, dan lainnya. Penilai kekayaan intelektual harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk izin sebagai penilai publik dari Kementerian Keuangan dan sertifikasi kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual.

Setelah pelaku ekonomi kreatif memenuhi persyaratan, mereka dapat mengajukan skema pembiayaan ke lembaga keuangan. Proses verifikasi dan penilaian melibatkan pengecekan kegiatan usaha, sertifikat kekayaan intelektual yang diajukan sebagai agunan, dan penilaian nilai kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan. Setelah proses ini selesai dan pelaku ekonomi kreatif dinyatakan layak, dilakukan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan, termasuk pembuatan perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris.

Untuk memastikan kekayaan intelektual dalam hal ini sebuah hak cipta dalam penggunaan konten Youtube sebagai jaminan, bank perlu mengambil beberapa langkah dan tindakan pencegahan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana bank dapat memastikan hak cipta dalam penggunaan konten YouTube mereka sebagai jaminan:

### **1. Pemeriksaan Dokumen**

Bank harus melakukan pemeriksaan dokumen yang cermat terkait dengan konten YouTube yang digunakan sebagai jaminan. Hal ini mencakup

memverifikasi keaslian konten, hak cipta yang dimiliki oleh pemilik konten, dan perizinan yang diperlukan.

## **2. Penggunaan Kontrak yang Tepat**

Bank harus mengatur kontrak atau perjanjian dengan pemilik konten YouTube yang secara tegas menyatakan bahwa bank memiliki hak untuk menggunakan konten tersebut sebagai jaminan. Kontrak ini harus mencakup semua detail terkait dengan hak cipta, penggunaan konten, dan kompensasi jika diperlukan.

## **3. Pemeriksaan Legalitas Konten**

Bank harus bekerja sama dengan penasihat hukum yang berpengalaman dalam hak kekayaan intelektual untuk memeriksa legalitas konten yang akan dijamin. Penasihat hukum dapat membantu bank memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta yang terkait dengan konten tersebut.

## **4. Verifikasi Hak Cipta**

Bank perlu memverifikasi dengan benar bahwa pemilik konten memiliki hak cipta yang sah atas konten yang digunakan sebagai jaminan. Ini melibatkan pengecekan dokumen hak cipta dan pengakuan pemilik konten.

## **5. Perjanjian Pemindahtanganan Hak Cipta**

Dalam beberapa kasus, bank mungkin perlu mendapatkan pemindahtanganan hak cipta dari pemilik konten. Ini berarti pemilik konten secara resmi mengalihkan hak cipta atas konten kepada bank sebagai jaminan.

## **6. Pantauan dan Pemeliharaan**

Setelah transaksi pembiayaan disetujui dan konten YouTube digunakan sebagai jaminan, bank perlu terus memantau penggunaan konten tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa hak cipta tetap terlindungi dan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

## 7. Penyelesaian Sengketa

Bank harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam kasus-kasus di mana ada perselisihan terkait dengan hak cipta. Ini dapat mencakup mediasi atau prosedur hukum yang relevan.

## 8. Kolaborasi dengan Pemilik Konten

Penting bagi bank untuk menjalin kerja sama yang baik dengan pemilik konten YouTube. Ini mencakup komunikasi terbuka dan transparan tentang penggunaan konten sebagai jaminan (Kadir Muhammad, 2000).

Dengan mengambil langkah-langkah ini, bank dapat meminimalkan risiko pelanggaran hak cipta dan memastikan bahwa hak cipta pemilik konten terlindungi dalam transaksi pembiayaan menggunakan konten Youtube sebagai jaminan.

Pemberian fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini menjadi upaya positif pemerintah dalam meningkatkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Fasilitasi ini mencakup proses pendaftaran hak kekayaan intelektual dan berbagai mekanisme untuk memudahkan pelaku ekonomi kreatif mengakses pembiayaan. Diharapkan adanya regulasi yang jelas dari setiap kementerian terkait untuk menjadi panduan dalam memberikan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Perlindungan hukum dalam transaksi pembiayaan berbasis konten YouTube khususnya bagi debitur (pemilik konten). Berikut adalah penjelasan singkat mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur:

### **Perlindungan Hukum bagi Debitur:**

**Hak Privasi:** Debitur memiliki hak privasi atas informasi dan data yang terkait dengan konten YouTube mereka. Kreditur harus menghormati hak privasi ini dan tidak mengakses atau menggunakan data tersebut tanpa izin yang sah.

**Perlindungan dari Penyalahgunaan:** Debitur dilindungi dari penyalahgunaan aset kekayaan intelektual mereka, termasuk konten YouTube. Penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah dapat mengakibatkan sanksi hukum.

**Hak Kontraktual:** Debitur memiliki hak yang diakui dalam perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan. Mereka harus memastikan bahwa persyaratan dan hak-hak mereka diatur secara adil dalam dokumen kontrak (Kadir Muhammad, 2000).

Selain itu, pembiayaan berbasis konten YouTube juga harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk peraturan hak cipta, dan aturan transaksi perbankan. Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa, kedua belah pihak dapat memanfaatkan sistem peradilan atau alternatif penyelesaian sengketa untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dan debitur menjadi penting dalam menjaga keadilan dan keamanan dalam transaksi pembiayaan berbasis konten YouTube.

Analisis kewajiban dan hak hukum masing-masing pihak dalam transaksi pembiayaan berbasis konten YouTube adalah hal yang penting untuk memastikan kepastian hukum. Berikut adalah paparan mengenai kewajiban dan hak hukum dari pihak debitur (pemilik konten):

#### **Kewajiban dan Hak Hukum Debitur**

##### **a. Hak Privasi**

Debitur memiliki hak privasi atas informasi dan data yang terkait dengan konten YouTube mereka. Kreditur harus menghormati hak privasi ini dan tidak mengakses atau menggunakan data tersebut tanpa izin yang sah.

##### **b. Kewajiban Pembayaran**

Debitur memiliki kewajiban untuk membayar pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Ini termasuk pembayaran bunga, pokok, dan jadwal pembayaran lainnya.

##### **c. Pemeliharaan Aset**

Debitur memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas konten YouTube yang dijadikan jaminan. Mereka tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merusak atau mengurangi nilai aset ini.

d. Kepatuhan Hukum

Debitur harus memastikan bahwa konten YouTube mereka mematuhi semua regulasi dan undang-undang yang berlaku, termasuk hak kekayaan intelektual. Mereka memiliki kewajiban untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

e. Hak Kontraktual

Debitur memiliki hak yang diakui dalam perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan. Mereka harus memastikan bahwa persyaratan dan hak-hak mereka diatur secara adil dalam dokumen kontrak (Undang-Undang No. 10, 1998).

Analisis kewajiban dan hak hukum ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam transaksi pembiayaan berbasis konten YouTube. Hal ini juga membantu menjaga kepastian hukum dan mencegah potensi konflik di masa depan. Jika terdapat sengketa atau perbedaan pendapat, pemahaman yang jelas tentang kewajiban dan hak hukum dapat menjadi dasar penyelesaian yang adil.

**D. Peran Konten Kreator dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Melalui Pembiayaan Kekayaan Intelektual**

Dalam era digital saat ini, konten kreator memegang peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi kreatif. Konten kreator, melalui penciptaan dan pengelolaan kekayaan intelektual, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif. Khususnya, akan diperhatikan bagaimana kekayaan intelektual tersebut dapat dijadikan instrumen dalam transaksi pembiayaan bank.

1. Kontribusi Konten Kreator terhadap Ekonomi Kreatif

Konten kreator memainkan peran signifikan dalam menciptakan nilai ekonomi melalui karya kreatif mereka, yang berkontribusi secara substansial terhadap pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Penjelasan mengenai peran ini meliputi beberapa aspek utama:

a. Penciptaan Karya Kreatif

Konten kreator menciptakan beragam bentuk karya, seperti video, musik, grafis, dan tulisan. Karya-karya ini tidak hanya mengandung nilai artistik, tetapi juga nilai ekonomi karena kemampuannya untuk menarik audiens dan pengiklan. Setiap karya yang unik dan menarik dapat menjadi sumber pendapatan melalui berbagai saluran, seperti iklan, sponsor, atau penjualan langsung kepada konsumen.

b. Pengaruh terhadap Tren dan Pasar

Konten kreator seringkali menjadi penggerak tren dan preferensi konsumen. Melalui konten yang mereka buat, mereka dapat mempengaruhi opini publik, mendorong permintaan terhadap produk atau jasa tertentu, dan bahkan menginspirasi inovasi dalam berbagai industri. Hal ini menunjukkan bagaimana karya kreatif dapat mempengaruhi pasar dan ekonomi secara lebih luas.

c. Pemanfaatan Platform Digital

Era digital memungkinkan konten kreator untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform seperti YouTube, Instagram, dan lainnya. Ini tidak hanya membuka peluang baru untuk monetisasi tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara keseluruhan, di mana berbagai pemangku kepentingan seperti platform digital, pengiklan, dan konsumen saling terhubung.

d. Inovasi dan Diversifikasi Produk

Konten kreator seringkali berinovasi dalam cara mereka menyampaikan cerita atau informasi. Inovasi ini mendorong diversifikasi produk dan jasa dalam ekonomi kreatif. Misalnya, pengembangan konten interaktif atau penggunaan teknologi baru dalam pembuatan konten dapat membuka pasar yang baru dan menciptakan peluang bisnis yang belum pernah ada sebelumnya.

e. **Pembangunan Merek dan Identitas**

Banyak konten kreator berhasil membangun merek pribadi yang kuat, yang tidak hanya meningkatkan nilai jual mereka tetapi juga memberikan inspirasi dan mempengaruhi pembentukan merek dalam industri kreatif lainnya. Pembangunan merek ini penting dalam menarik investasi dan kemitraan, yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang dalam sektor ekonomi kreatif.

Peran konten kreator dalam menciptakan nilai ekonomi melalui karya kreatif mereka sangat penting. Mereka tidak hanya berkontribusi langsung melalui penciptaan dan monetisasi konten, tetapi juga secara tidak langsung melalui pengaruh mereka terhadap tren, pasar, dan inovasi. Keberadaan mereka memperkaya ekosistem ekonomi kreatif dan mendorong pertumbuhan sektor ini secara lebih luas.

2. **Kekayaan Intelektual sebagai Aset**

Karya yang diciptakan oleh konten kreator, seperti video, musik, dan grafik, dapat dianggap sebagai aset kekayaan intelektual karena beberapa alasan utama:

a. **Hak Cipta dan Perlindungan Hukum**

Saat konten kreator menciptakan sebuah karya orisinal, secara otomatis karya tersebut dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta ini memberikan mereka hak eksklusif untuk menggunakan, menggandakan, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut. Perlindungan ini menjadikan karya mereka sebagai aset hukum yang dapat dikontrol dan dikelola.

b. **Nilai Ekonomi**

Karya kreatif memiliki nilai ekonomi karena potensinya untuk menghasilkan pendapatan. Ini bisa melalui iklan, penjualan langsung, lisensi, atau bentuk monetisasi lainnya. Sebagai contoh, video yang populer di YouTube dapat menghasilkan pendapatan iklan yang

signifikan, musik dapat dilisensikan untuk digunakan dalam film atau acara TV, dan desain grafis dapat dijual sebagai merchandise atau seni cetak.

c. Pemindahtanganan dan Lisensi

Hak atas karya intelektual dapat dipindahtangankan atau dilisensikan kepada pihak lain. Ini berarti konten kreator dapat menjual atau menyewakan hak untuk menggunakan karya mereka kepada orang lain, menciptakan aliran pendapatan tambahan. Kesepakatan lisensi ini seringkali merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak kreator.

d. Identitas dan Merek

Karya yang diciptakan seringkali menjadi bagian dari identitas dan merek pribadi konten kreator. Hal ini menambah nilai intangible pada aset tersebut. Merek pribadi yang kuat dapat meningkatkan nilai karya karena keterkaitannya dengan individu atau grup tertentu yang mungkin memiliki pengikut setia.

e. Kemampuan untuk Menghasilkan Pendapatan Jangka Panjang

Karya kekayaan intelektual memiliki potensi untuk terus menghasilkan pendapatan selama periode yang panjang, bahkan setelah mereka berhenti aktif membuat konten baru. Hak cipta untuk karya tertentu dapat bertahan selama puluhan tahun, memberikan kesempatan bagi kreator untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka dalam jangka waktu yang lama.

f. Keterhubungan dengan Teknologi dan Tren Pasar

Karya intelektual ini juga sering kali terhubung erat dengan perkembangan teknologi terkini dan tren pasar, membuatnya relevan dan berpotensi mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menambah kemungkinan karya tersebut untuk terus relevan dan bernilai secara ekonomi.

Dengan demikian, karya yang diciptakan oleh konten kreator merupakan aset kekayaan intelektual yang berharga, tidak hanya karena

perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka, tetapi juga karena nilai ekonomi, potensi lisensi, identitas merek, dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan jangka panjang yang mereka miliki.

### 3. Kasus Studi dan Contoh Nyata

Salah satu contoh nyata yang menunjukkan bagaimana konten kreator berhasil menggunakan kekayaan intelektual mereka untuk mendapatkan pembiayaan adalah kasus dari Youtuber dan *influencer* Indonesia, Atta Halilintar. Atta Halilintar dikenal sebagai salah satu Youtuber dengan jumlah *subscriber* terbanyak di Indonesia dan telah berhasil memanfaatkan popularitas serta konten yang ia ciptakan untuk mengembangkan bisnisnya.

#### a. Monetisasi Konten YouTube

Atta Halilintar menghasilkan pendapatan signifikan melalui monetisasi kanal YouTube-nya. Konten yang ia buat, yang mencakup vlog, prank, dan konten hiburan lainnya, menarik jutaan penonton, yang menghasilkan pendapatan iklan yang besar.

#### b. Kolaborasi dengan *Brand* dan *Sponsorship*

Ketenaran dan pengaruhnya di media sosial membuka peluang kolaborasi dengan berbagai merek besar. Atta Halilintar sering kali bekerja sama dengan merek-merek untuk menciptakan konten yang disponsori, yang menjadi sumber pendapatan tambahan.

#### c. Pembangunan Merek Pribadi dan *Merchandise*

Atta Halilintar juga berhasil membangun merek pribadinya. Ia meluncurkan berbagai produk merchandise seperti pakaian dan aksesoris yang terkait dengan identitasnya sebagai Youtuber terkenal. Produk-produk ini dijual secara daring dan mendapatkan respon positif dari penggemarnya.

#### d. Ekspansi Bisnis dan Investasi

Dengan modal yang diperoleh dari kesuksesan di YouTube dan kolaborasi merek, Atta Halilintar menginvestasikan pendapatannya untuk memulai dan mengembangkan berbagai usaha bisnis lainnya, seperti

restoran dan bisnis pakaian. Ini menunjukkan bagaimana ia memanfaatkan kekayaan intelektual yang ia ciptakan untuk memperoleh pembiayaan yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai bentuk usaha.

e. Pengaruh Sosial dan Kerjasama dengan Investor

Popularitas dan pengaruhnya juga menarik perhatian investor dan mitra bisnis yang tertarik untuk bekerja sama dengannya. Hal ini membuka lebih banyak peluang untuk mendapatkan pembiayaan eksternal dan ekspansi bisnis.

Atta Halilintar ini menjadi contoh bagaimana konten kreator dapat menggunakan kekayaan intelektual yang mereka ciptakan, tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan langsung dari platform seperti YouTube, tetapi juga untuk membangun dan mengembangkan bisnis serta memperoleh pembiayaan dalam skala yang lebih besar.

Selain itu contoh lainnya dari konten kreator yang berhasil menggunakan kekayaan intelektual mereka untuk mendapatkan pembiayaan adalah Ria Ricis, seorang Youtuber terkenal di Indonesia. Ria Ricis telah memanfaatkan platform YouTube dan media sosial untuk mengembangkan karirnya dan mengakses peluang pembiayaan sama seperti Atta Halilintar, Ria Ricis juga menunjukkan bagaimana seorang konten kreator dapat memanfaatkan popularitas dan kekayaan intelektual yang diciptakan melalui media sosial untuk tidak hanya menghasilkan pendapatan langsung dari platform seperti YouTube, tetapi juga untuk membangun merek pribadi, mengembangkan produk dan bisnis, serta menarik investasi dan kerjasama bisnis. Ini menggambarkan potensi besar yang dimiliki oleh konten kreator dalam ekonomi kreatif saat ini.

Pembuat konten di YouTube atau kerap disebut 'YouTuber' kini dipandang sebagai profesi mapan yang berprospek. Meski tak memiliki penghasilan tetap seperti karyawan kantoran, namun YouTuber bisa mendapat penghasilan yang bikin gaji UMR Anda minder. Penghasilan

Youtuber bisa didapat dari beberapa pemasukan. Antara lain kontrak dengan *brand*, pembicara di acara-acara, serta *Adsense*. (Redaksi CNBC Indonesia, 2023)

#### 10 YouTuber R.I. Subscriber Terbanyak

No.	Nama	Subscriber	View	Video	Estimasi Pendapatan
1	Ria Ricis	32,6 juta	5,9 miliar	2.605	\$ 14.700 - 235.000
2	Atta Halilintar	30,4 juta	4,3 miliar	2.151	US\$ 6.400 - 101.700
3	Jess No Limit	30,8 juta	3,6 miliar	2.149	US\$ 70.800 - 1,1 juta
4	Frost Diamond	29,2 juta	7,1 miliar	2.780	US\$ 89.400 - 1,4 juta
5	Rans Entertainment	25,3 juta	6,3 miliar	3.666	\$ 15.000 - 239.500
6	Baim Paula	21,1 juta	4,5 miliar	2.288	US\$ 6.600 - 106.400
7	Deddy Corbuzier	20,6 juta	4,9 miliar	1.354	\$ 15.500 - 247.000
8	BabyBus	20,2 juta	11,7 miliar	849	\$ 20.700 - 331.600
9	MiawAug	20,1 juta	6 miliar	3.687	US\$ 16.400-262.500
10	Naisa Alifia Yuriza	18,3 juta	1,5 miliar	756	US\$ 7.100-113.300

Sumber Data : CNBC Indonesia

(<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230628123446-37-449925/10-youtuber-ri-subscriber-terbanyak-gajinya-bikin-ngiler/2>)

#### 4. Regulasi dan Kepastian Hukum

Pembahasan mengenai regulasi yang relevan dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam menggunakan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembiayaan adalah topik yang sangat penting dalam konteks ekonomi kreatif saat ini. Berikut adalah beberapa aspek utama dari pembahasan tersebut:

##### a. Regulasi Hak Cipta

Regulasi hak cipta merupakan fondasi hukum yang menjamin perlindungan kekayaan intelektual. Di Indonesia, regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini memberikan kejelasan mengenai hak-hak yang dimiliki pencipta atas

karya mereka, termasuk hak untuk menggunakan, menggandakan, dan memanfaatkan karya tersebut secara komersial.

**b. Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai Aset**

Untuk menggunakan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembiayaan, penting bagi pencipta untuk memastikan bahwa aset intelektual mereka secara sah terdaftar dan dilindungi. Ini termasuk pendaftaran hak cipta, merek, atau paten, tergantung pada jenis kekayaan intelektual yang dimiliki.

**c. Regulasi Pembiayaan Berbasis Aset**

Regulasi yang berkaitan dengan pembiayaan berbasis aset, termasuk kekayaan intelektual juga penting. Ini mencakup ketentuan tentang bagaimana aset intelektual dapat dijadikan jaminan untuk pembiayaan, proses penilaiannya, dan bagaimana hak-hak kreditur diatur dalam kasus default.

**d. Transparansi dan Akuntabilitas**

Kepastian hukum juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi yang melibatkan kekayaan intelektual. Ini termasuk kejelasan dalam perjanjian lisensi, pembagian royalti, dan hak serta kewajiban yang terkait.

**e. Penyelesaian Sengketa**

Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil sangat penting dalam kasus terjadi konflik terkait penggunaan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembiayaan. Ini mencakup akses ke lembaga arbitrase atau pengadilan yang kompeten dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual.

**f. Kebijakan Publik dan Dukungan Pemerintah**

Pemerintah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penggunaan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembiayaan. Ini bisa melalui pembuatan kebijakan yang mendukung inovasi dan

keaktivitas, serta menyediakan sumber daya dan bantuan untuk pelaku ekonomi kreatif dalam mengelola aset intelektual mereka.

**g. Edukasi dan Kesadaran Hukum**

Penyuluhan dan edukasi tentang hak kekayaan intelektual dan penggunaannya dalam pembiayaan juga sangat penting. Peningkatan kesadaran dan pemahaman ini akan membantu pelaku ekonomi kreatif dalam mengelola aset mereka secara lebih efektif dan memanfaatkan potensi pembiayaan yang tersedia.

Dengan demikian, kebutuhan akan kepastian hukum dan regulasi yang relevan dalam menggunakan kekayaan intelektual sebagai instrumen pembiayaan merupakan hal krusial yang mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pencipta dan pemegang hak, tetapi juga memberikan kejelasan dan keamanan bagi investor dan lembaga pembiayaan yang terlibat.

Konten kreator yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen dalam transaksi pembiayaan menghadapi beberapa tantangan hukum. Berikut adalah paparan mengenai tantangan-tantangan tersebut:

**a. Penilaian Nilai HKI**

Salah satu tantangan utama adalah menentukan nilai ekonomi dari HKI. Karena sifatnya yang tidak berwujud dan tergantung pada popularitas serta penerimaan pasar, penilaian HKI bisa sangat subjektif. Ini menyulitkan dalam menentukan nilai jaminan untuk transaksi pembiayaan.

**b. Perlindungan Hak Cipta yang Tidak Memadai**

Konten kreator sering kali menghadapi masalah dengan perlindungan hak cipta yang tidak memadai, terutama jika mereka tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk mendaftarkan hak cipta mereka

secara resmi. Tanpa perlindungan yang memadai, sulit untuk menggunakan HKI sebagai jaminan.

c. Perubahan Cepat dalam Teknologi dan Tren

Dunia digital dan media sosial berubah sangat cepat, dan ini bisa mempengaruhi relevansi dan nilai dari karya yang dihasilkan. Konten kreator harus terus menerus berinovasi agar tetap relevan, yang bisa menjadi tantangan dalam menjaga nilai HKI mereka dalam jangka panjang.

d. Kesulitan dalam Penegakan Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta sering terjadi di internet, dan menegakkan hak cipta bisa menjadi proses yang panjang dan mahal. Ini menjadi tantangan bagi konten kreator dalam memastikan bahwa HKI mereka tidak disalahgunakan, yang bisa mempengaruhi nilai mereka sebagai aset.

e. Regulasi yang Berubah-ubah

Peraturan yang mengatur HKI dan transaksi pembiayaan bisa berubah-ubah, tergantung pada kebijakan pemerintah dan perkembangan hukum. Konten kreator harus terus mengikuti perubahan ini untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan memaksimalkan potensi HKI mereka.

f. Ketidakpastian Kontrak dan Persyaratan Lisensi

Membuat kontrak yang efektif dan memahami persyaratan lisensi bisa menjadi tantangan, terutama bagi konten kreator yang tidak memiliki latar belakang hukum. Kesalahan dalam kontrak atau ketidakpahaman tentang lisensi dapat menyebabkan kerugian finansial atau kehilangan kontrol atas karya mereka.

g. Akses ke Sarana Hukum dan Pembiayaan

Konten kreator, terutama yang masih baru atau dengan sumber daya terbatas, mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses sarana hukum dan lembaga pembiayaan yang memahami nilai HKI. Hal ini bisa

menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pembiayaan berdasarkan HKI.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kombinasi dari pengetahuan hukum yang baik, pemahaman tentang dinamika pasar, serta strategi yang efektif dalam mengelola dan melindungi HKI. Kerjasama dengan ahli hukum, konsultan, dan lembaga pembiayaan yang tepat juga sangat penting dalam membantu konten kreator menghadapi tantangan ini.

Selain itu dalam transaksi pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bank juga menghadapi beberapa tantangan hukum yang signifikan. Berikut adalah paparan mengenai tantangan tersebut:

a. Penilaian Aset HKI

Salah satu tantangan terbesar bagi bank adalah menilai secara akurat nilai ekonomi dari aset HKI. Berbeda dengan aset fisik, nilai HKI sangat tergantung pada faktor-faktor seperti popularitas, penerimaan pasar, dan potensi pendapatan di masa depan, yang sulit diukur dan dapat berubah-ubah.

b. Risiko Likuiditas

Aset HKI memiliki risiko likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset tradisional. Dalam kasus gagal bayar, mengonversi HKI menjadi uang tunai bisa lebih sulit dan memakan waktu lebih lama. Bank perlu mempertimbangkan risiko ini dalam membuat keputusan pembiayaan.

c. Perubahan Dinamika Pasar

HKI sangat terpengaruh oleh tren dan dinamika pasar yang cepat berubah. Bank harus memiliki pemahaman yang baik tentang industri terkait dan bagaimana perubahan tren dapat mempengaruhi nilai dari aset HKI.

d. Kerumitan Hukum dan Regulasi

HKI dikelilingi oleh kerumitan hukum, termasuk hukum hak cipta, merek, paten, dan lainnya. Bank harus memastikan bahwa semua aspek

legal telah terpenuhi dan bahwa hak cipta atau hak terkait lainnya tidak dilanggar.

e. Penegakan Hak dan Sengketa

Bank harus siap menghadapi potensi sengketa hukum terkait HKI. Ini bisa termasuk pelanggaran hak cipta atau sengketa tentang kepemilikan aset HKI. Menegakkan hak dalam kasus seperti ini bisa rumit dan membutuhkan sumber daya hukum yang signifikan.

f. Pemahaman Spesifik Industri

Untuk melakukan penilaian yang efektif, bank memerlukan pemahaman yang dalam tentang industri spesifik di mana HKI tersebut beroperasi. Ini termasuk pemahaman tentang cara kerja industri, potensi pertumbuhan, dan risiko yang terkait.

g. Perlindungan Kreditur

Bank juga harus mempertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk melindungi posisi mereka sebagai kreditur dalam transaksi berbasis HKI. Ini termasuk memastikan bahwa ada jaminan hukum yang cukup dalam kasus default dan bahwa mereka memiliki klaim prioritas atas aset HKI.

h. Kebijakan Internal dan Manajemen Risiko

Bank harus mengembangkan dan memperbarui kebijakan internal serta strategi manajemen risiko untuk mengakomodasi karakteristik unik dari pembiayaan berbasis HKI. Hal ini termasuk pelatihan staf untuk menangani jenis aset ini dan membuat keputusan kredit yang tepat.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang HKI, keahlian dalam penilaian aset tidak berwujud, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Bank juga perlu berkolaborasi dengan ahli hukum dan konsultan industri untuk memastikan keputusan pembiayaan yang tepat dan mengurangi risiko terkait.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) dalam transaksi pembiayaan bank, khususnya terkait

dengan konten YouTube. HKI, termasuk hak cipta, merek dagang, paten, dan rahasia dagang, menjadi aspek penting dalam menentukan nilai dan kepastian hukum aset dalam pembiayaan. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 mendukung ekonomi kreatif dengan mengatur skema pembiayaan yang mengandalkan HKI sebagai jaminan (Fallah, Sapta Nuru., & Mulyati, 2019). Namun, penggunaan konten YouTube sebagai jaminan menghadapi tantangan hukum, seperti penentuan nilai HKI, perlindungan hak cipta, dan dinamika pasar yang cepat berubah. Baik kreditur maupun debitur harus memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi ini, dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk menjaga kepastian hukum. Konten kreator memegang peran kunci dalam mendorong ekonomi kreatif melalui karya kreatif mereka yang dianggap sebagai aset HKI. Mereka menghadapi tantangan dalam menilai nilai HKI, perlindungan hak cipta, dan penegakan hak. Di sisi lain, bank menghadapi tantangan dalam menilai aset HKI, risiko likuiditas, dan penegakan hukum. Kesadaran hukum dan kolaborasi antar pihak terkait menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi pembiayaan berbasis HKI.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Dalam kesimpulan artikel ini, dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Bahwa perlu pemahaman yang mendalam tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peran peraturan perundang-undangan, serta analisis kewajiban dan hak hukum masing-masing pihak sangat penting dalam memastikan kepastian hukum konten YouTube sebagai jaminan dalam transaksi pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif khususnya konten kreator.
2. Bahwa implementasi atas pengaturan pembiayaan kekayaan intelektual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mencakup beberapa aspek, termasuk pemberian fasilitas

pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, perlindungan hukum bagi debitur, peran konten kreator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pembiayaan kekayaan intelektual, dan tantangan hukum yang dihadapi oleh konten kreator dalam menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai instrumen pembiayaan. Ini menegaskan pentingnya regulasi yang jelas, perlindungan hukum yang kuat, dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban di antara semua pihak terlibat dalam transaksi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Perlunya pengembangan regulasi yang lebih rinci dan jelas mengenai penggunaan konten YouTube sebagai jaminan pembiayaan, termasuk ketentuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), prosedur penilaian nilai konten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
2. Perlunya pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam mengembangkan sistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Hal ini mencakup penguatan regulasi yang mendukung perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur dan kreditur, peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif, serta pemberdayaan melalui edukasi dan dukungan teknis bagi konten kreator dalam memahami dan menggunakan hak kekayaan intelektual mereka sebagai aset yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rafli, M., Bachri, E., & Ramadan, S. (2023). Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Prov. Lampung Dan Bi). *Presumption of Law*, 5(1), 87–108. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/4497>
- Asrika Fazlia, S., Suryahartati, D., & Naili Hidayah, L. (2022). Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta. *Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 392. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18693>
- Fallah, Sapta Nur., & Mulyati, E. (2019). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Jurnal Litigasi*, 20(2), 223–240.
- Intan Rakhmayanti Dewi. (2023). *Ada 21 Startup Unicorn Di Indonesia, Ini Daftar Lengkapnya*. Cnbc Indonesia.
- Kadir Muhammad, A. (2000). *Segi Hukum Keuangan Dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Ppn/Bappenas. (2023a, November). Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia (Triwulan III Tahun 2023). *Volume 7, No. 3, 2*. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/update\\_ekonomi/ekonomi\\_makro/2023/laporan\\_perkembangan\\_ekonomi\\_indonesia\\_dan\\_dunia\\_triwulan\\_iii\\_2023.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/update_ekonomi/ekonomi_makro/2023/laporan_perkembangan_ekonomi_indonesia_dan_dunia_triwulan_iii_2023.pdf)
- Kementerian Ppn/Bappenas. (2023b, November). Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia (Triwulan III Tahun 2023). *Volume 7, No. 3, 12*. [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/update\\_ekonomi/ekonomi\\_makro/2023/laporan\\_perkembangan\\_ekonomi\\_indonesia\\_dan\\_dunia\\_triwulan\\_iii\\_2023.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/update_ekonomi/ekonomi_makro/2023/laporan_perkembangan_ekonomi_indonesia_dan_dunia_triwulan_iii_2023.pdf)
- Peraturan Pemerintah No. 24, 1 (2022). <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/pp/2022/pp-nomor-24-tahun-2022.pdf>
- Lutfi, U. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Pbjek Jaminan Fidusia. *Journal Of Private And Commercial Law*, 1(No. 1), 85. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/article/view/12357>
- Pasal 19 & 22 Uu No. 24, (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/123686/uu-no-24-tahun-2019>
- Undang-Undang No. 24, Pub. L. No. 24 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/123686/uu-no-24-tahun-2019>

- Pardede, Agustinus, Dkk. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham.
- Redaksi Cnbc Indonesia. (2023). *10 Youtuber Ri Subscriber Terbanyak, Gajinya Bikin Ngiler*. Cnbc Indonesia.
- Undang-Undang No. 10, (1998). <https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (I)*. Bandung Oase Media.
- Sutikno, Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas. Sabiq, Fairuz. & Nashirudin, M. (2024). Analisis Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 870.